

# **Pelibatan Organisasi Masyarakat Dalam Intelijen Keamanan Nasional**

**Yudha Fernando**<sup>2</sup>

Email: Fernandoalonzo27@gmail.com

---

## **Abstract**

The problem examined in this study is the role of civil society in intelligence activities for national security, while the purpose is to determine the role and form of civil society can play in intelligence activities. Theories that researchers use include theories of intelligence, national security, institutions and sociology. The research approach used in this study is a qualitative approach and the type of descriptive qualitative research using a case study model. Researchers used interview techniques, document studies and observations. Then the data is analyzed with an interactive analysis model and validated. There are two roles that can be bound by civil society in intelligence activities, namely the role of collecting information and the role of covert action. The first role is in the form of providing information and data to national security intelligence organizations, while the second role is in the form of outreach and de-radicalization activities.

**Keywords:** *Intelligence, National Security, Civil Society*

*Copyright © 2019 Jurnal Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved*

---

---

<sup>2</sup>Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara

## 1. Pendahuluan

Intelijen merupakan bagian yang sangat menentukan bagi ketahanan nasional. Sebab intelijen mempunyai peran penting didalam keselamatan negara dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari dalam maupun dari luar negeri. Peran intelijen sangat signifikan dalam menciptakan stabilitas nasional, khususnya berkaitan dengan masalah keamanan Nasional.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah peran civil society didalam kegiatan intelijen guna keamanan nasional, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dapat diberikan civil society dalam kegiatan intelijen dan bentuk implementasi *civil society* didalam aktifitas intelijen tersebut. *Outcome* dari penelitian ini adalah meningkatnya ketahanan nasional seiring dengan meningkatnya keamanan nasional yang dihasilkan dari kegiatan intelijen.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan pembahasan, serta menjadi referensi perkembangan kajian ilmu intelijen dalam hal pelibatan civil society pada kegiatan intelijen keamanan nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pada organisasi intelijen guna melibatkan *civil society* didalam kegiatan intelijen agar tercapainya keamanan nasional.

## 2. Landasan Teori

### 2.1. Intelijen

Kent, 1950. mendefinisikan intelijen sebagai pengetahuan. Berkaitan dengan pertukaran pengetahuan intelijen yang dikenal dengan intelijen positif asing tingkat tinggi. Intelijen positif asing sesungguhnya asing dalam tujuan, ruang lingkup dan substansi. Secara azasi, intelijen dapat menolong untuk mengetahui ancaman apa yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memungkinkan suatu perencanaan yang terarah atau pengambilan tindakan secara diperhitungkan terlebih dahulu,

dan untuk menyingkirkan rintangan atau hambatan sebelum suatu tujuan dilaksanakan, sehingga resiko ancaman dapat diperkecil seminim-minimnya. Organ intelijen berfungsi menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan untuk early detection dan early warning.

Untuk itu setiap badan intelijen harus menyediakan intelijen yang benar, jujur, tepat dan cepat (*velox et exactus*), sehingga pengguna (*user*) mempunyai informasi sempurna mengenai suatu masalah dan waktu yang cukup, sebelum memutuskan suatu kebijakan atau tindakan. Intelijen merupakan bagian yang sangat menentukan bagi keselamatan negara dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari dalam maupun dari luar negeri. Peran intelijen sangat signifikan dalam menciptakan stabilitas nasional, khususnya berkaitan dengan masalah keamanan.

Intelijen dalam suatu negara dimaknai dalam tiga penampilannya, yaitu penampilan sebagai organisasi (*organization*), penampilan sebagai aktivitas (*activity*), dan penampilan sebagai suatu pengetahuan (*knowledge*). Sementara itu tugas intelijen diantaranya adalah menggagalkan hingga meniadakan ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan integritas wilayah negara, melalui pengamatan secara terus menerus dan bersifat sistematis terhadap potensi-potensi yang dapat menimbulkan ancaman dalam bentuk deteksi dini.

Jika kita berbicara intelijen, maka hal ini tidak akan terlepas dengan apa yang disebut dengan Roda Perputaran Intelijen (RPI) atau juga disebut daur intelijen atau the intelligence cycle. RPI adalah suatu proses pengembangan informasi dasar menjadi produk intelijen bagi pengguna (*user*) untuk pengambilan keputusan atau tindakan. Dengan kata lain, RPI adalah tahapan yang dilakukan oleh intelijen selaku organisasi didalam menghasilkan suatu output yang berupa intelijen sebagai sebuah pengetahuan (Produk suatu analisis) dengan menggunakan metode intelijen selaku aktifitas.

Empat tahap kegiatan dalam RPI adalah perencanaan dan pengarahan (*planning and direction*), pengumpulan (*collection*), proses pengolahan (*processing*) dan penggunaan dan distribusi (*distribution*).



Bagan 1: Roda Perputaran Intelijen/*Intelligence Cycle*

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada tahap *collecting* pada roda perputaran intelijen, sebab pelibatan *civil society* dalam aktifitas intelijen keamanan nasional ada dalam tahap tersebut. Intelijen menyertakan *civil society* guna pengumpulan bahan keterangan yang akan diproses guna menjadi pengetahuan.

Pengumpulan keterangan, adalah pengumpulan informasi dasar untuk diolah menjadi produk intelijen. Terdapat banyak sumber informasi atau keterangan, termasuk sumber terbuka seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, buku-buku, dan sejenisnya, yang mudah diperoleh secara terbuka. Di lain pihak, terdapat informasi yang harus diperoleh dengan cara tertutup, yaitu melalui kegiatan rahasia atau *clandestine*.

## 2.2. Konsep Lembaga & Sosiologi

Definisi dari *Civil Society* yaitu mereka yang mewujudkan organisasi dan struktur kekuasaan serta melaksanakan pengaruh yang lebih langsung terhadap kehidupan bernegara. *Civil Society* ini bisa dijadikan lembaga

pendukung bagi kegiatan intelijen, khususnya dalam kegiatan pengumpulan informasi yang terkait dengan kemandirian nasional.

Matrutty menjelaskan definisi *Civil Society* menurut Anwar Ibrahim merupakan sistem sosial yang subur yang berasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dibidang pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Eisenstadt dalam Matrutty mendefinisikan *civil society* sebagai suatu masyarakat baik secara individual maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Dari definisi diatas, maka tidak lengkap jika kita tidak membahas definisi lembaga dan sosiologi guna mengerti makna dari *civil society*.

Yuda, Endra. menyebutkan definisi *civil society* berdasarkan kamus Roebert sebagai “bentuk kolektif atau struktur dasar dari organisasi sosial sebagaimana dibangun oleh hukum atau manusia”. Dalam arti ini, organisasi masyarakat mempunyai pengaruh yang tidak dapat disangkal terhadap kehidupan bernegara. Contohnya seperti aturan terkait perkawinan, aturan terkait sekolah dan etika sosial mempengaruhi hubungan dengan lembaga Negara, termasuk didalamnya lembaga intelijen.

Membahas organisasi masyarakat, maka kita tidak akan lepas dengan terminologi sosiologi. Sebab dengan terminologi ini kita dapat memperoleh suatu pemaknaan hubungan sosial diantara masyarakat. Istilah “sosiologi” ditemukan pada tahun 1839 oleh Auguste Comte (di dalam bukunya *Cours de philosophie Positive*, jilid 4) untuk menunjukkan ilmu tentang masyarakat. Sejak masa Comte, penggunaan kata “sosiologi” tidak banyak berubah (Supardin, 2014). Ada kalangan yang ingin membatasinya pada ilmu sosial pada umumnya, suatu ilmu sintesa yang menggabungkan kesimpulan-kesimpulan

penelitian khusus yang diadakan dalam setiap disiplin sosial masing-masing. Konsep ini sama sekali tidak dapat diterima karena penelitian dan sintesa tidak dapat dipisahkan di dalam bidang ilmiah, setiap kepingan penelitian terpaut pada hipotesa-hipotesa, kepada teori-teori, kepada sintesa-sintesa awal yang bersifat sementara. Akibatnya, bagi kebanyakan ahli sosiologi, “sosiologi” tetap menunjuk pada seluruh tubuh ilmu-ilmu sosial, dan kita akan mempergunakan istilah tersebut disini dalam artian ini. Sejalan dengan itu, setiap bidang ilmu sosial tertentu dapat ditunjukkan dengan menambahkan kata sifat pengubah kepada kata “sosiologi” – sosiologi ekonomi, sosiologi agama, sosiologi politik, sosiologi keluarga dan seterusnya.

Kebanyakan hubungan-hubungan sosial didasarkan bukan saja pada fakta-fakta positif. Akan tetapi juga pada pertimbangan-pertimbangan nilai. Pada pandangan pertama, ini kelihatannya akan menyingkirkan setiap studi ilmiah tentang fenomena sosial, sekurang-kurangnya dalam pengertian ilmu yang tradisional sebagaimana didefinisikan dalam hubungannya dengan pertimbangan kenyataan (*reality judgments*), untuk menghindari pertimbangan nilai. Namun kesulitan ini bisa diatasi bilaman kita mempelajari pertimbangan nilai yang diperkembangkan di dalam suatu masyarakat sebagai unsur-unsur realita sosial.

### 2.3. Keamanan Nasional

Aspek Kepentingan Nasional dapat dipandang sebagai dua sisi dari keping mata uang yaitu Aspek Keamanan dan Aspek Kesejahteraan, namun pada era globalisasi sekarang ini ada pula yang membaginya menjadi tiga aspek yaitu Keamanan, Kesejahteraan dan Ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia menganut tiga aspek, terlihat dengan keberadaan Menkopolkam, Menkokesra dan Menko Ekonomi dengan berbagai variasi nama tetapi substansi sama. Untuk menjaga, memelihara, melindungi Kepentingan Nasional maka diperlukan Kebijakan Umum Nasional oleh Presiden pada

awal masa pemerintahannya yang meliputi Kebijakan Umum Keamanan Nasional, Kebijakan Umum Kesejahteraan Nasional dan Kebijakan Umum Ekonomi Nasional. Pengertian Kebijakan Nasional adalah cara bertindak secara luas atau pernyataan tentang arah yang diadopsi pemerintah ditingkat nasional dalam rangka menjaga Kepentingan Nasional untuk mencapai Tujuan Nasional.

## 3. Metode Penelitian

### 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi civil society dalam kegiatan intelijen melalui fenomena-fenomena sosial yang terjadi dari sudut pandang subjek, dimana peneliti merupakan instrumen kuncinya. Selain itu, pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan kualitatif dinilai tim peneliti sesuai untuk menjelaskan pelibatan publik dalam kegiatan intelijen guna mewujudkan keamanan nasional merupakan fenomena sosial yang cenderung dapat digambarkan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dibandingkan dengan angka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskripsi kualitatif dengan mempelajari pelibatan yang ada antara civil society dengan organisasi intelijen keamanan nasional serta tata cara kerja yang berlaku didalam kegiatan intelijen tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan pelibatan civil society didalam kegiatan intelijen guna keamanan nasional, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada. Penelitian

deskriptif ini menggunakan model studi kasus, dimana peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana pelibatan publik dalam kegiatan intelijen guna mewujudkan keamanan nasional.

### 3.2. Validasi Data

Penelitian ini juga melakukan validitas guna memperoleh akurasi terhadap hasil penelitian. Peneliti mengukur derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Terminologi valid dalam penelitian ini adalah “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data utama yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan sumber data utama dan tambahan.

Jenis data yang didapatkan dalam pengumpulan data ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan informan (Praktisi, akademisi dan peneliti). Sedangkan data sekunder didapatkan dari observasi dan studi dokumen-dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan oleh peneliti sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilakukan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu suatu analisa yang di mulai dengan tahapan mereduksi data, lalu menyajikan data tersebut dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Penelitian ini dimulai dengan kegiatan pengumpulan data primer dengan metode wawancara mendalam terhadap narasumber yang berasal dari praktisi intelijen keamanan nasional (Kamnas), peneliti intelijen Kamnas dan akademisi intelijen Kamnas dan ditambahkan dengan data sekunder dari hasil observasi dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti. Hasil kontak data kemudian direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting terkait pelibatan civil society dalam kegiatan intelijen Kamnas guna penguatan ketahanan nasional, mencari tema polanya serta membuang data yang dianggap tidak penting, sehingga data lebih mudah untuk dikendalikan.

Hasil wawancara mendalam yang berasal dari praktisi intelijen keamanan nasional adalah pelibatan civil society dalam kegiatan intelijen selama ini memang sudah dilakukan. Motivasi dari civil society untuk mau terlibat dalam kegiatan intelijen guna keamanan nasional diantaranya karena penghasilan (money), kesamaan nilai (ideology) dan kesamaan musuh/dendam pribadi (Revenge). Selain itu, didalam melibatkan civil society, narasumber juga memperhatikan faktor keamanan dan kemampuan civil society didalam kegiatan intelijen. Faktor keamanan yang dimaksud adalah apakah lingkungan eksternal maupun internal civil society beresiko untuk kegiatan rahasia intelijen?, apakah civil society terkait riskan untuk blow up kegiatan rahasia intelijen. Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian kemampuan adalah apakah civil society mampu baik secara tuisi maupun karakter organisasi melakukan kegiatan rahasia intelijen. Contohnya civil society yang bergerak dalam bidang riset mampu untuk melakukan kegiatan collecting data maupun analisa data yang dapat berguna dalam kegiatan rahasia intelijen. Lebih lanjut narasumber mengatakan bahwa sejarah pernah mengungkapkan bahwa organisasi intelijen kemandirian nasional pernah bekerja sama

dengan lembaga riset nirlaba seperti CSIS diwaktu lampau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti intelijen pada *Makara Strategic Insight* dan Lentera Masa Depan Bangsa sebagai narasumber, diperoleh data bahwa secara teori sumber data pada intelijen keamanan nasional memang terdapat komponen *civil society*, sehingga pelibatannya tidak dapat dipungkiri. Selanjutnya narasumber menjelaskan bahwa Informasi intelijen dapat diperoleh dari berbagai sumber. Keberagaman sumber-sumber informasi tersebut dapat dikategorikan berdasarkan jenis organisasi intelijennya. Pada umumnya sumber-sumber informasi berdasarkan semua jenis organisasi intelijen adalah sama, akan tetapi ada sedikit perbedaan didalam urutan prioritasnya. Sumber informasi intelijen tersebut dapat diperoleh dari open source information, jaring agen, teknologi intelijen maupun kegiatan rahasia (girah) seperti surveillance atau stakeout. Lebih lanjut peneliti dari *Makara Strategic Insight* menyatakan bahwa organisasi intelijen terkait keamanan nasional pernah melakukan kerjasama dengan salah satu media prominent di Indonesia guna melakukan kegiatan jurnalistik investigasi terkait collecting informasi intelijen. Secara pribadi peneliti dari Lentera Masa Depan Bangsa juga mengakui pernah bekerjasama dengan intelijen keamanan nasional guna kegiatan pengumpulan informasi.

Peneliti juga melakukan wawancara tidak-berstruktur terhadap akademisi intelijen. Dalam wawancara tersebut peneliti tidak terikat secara ketat pada pedoman wawancara. Pelaksanaan dilakukan dimana saja dan kapan saja selama berhubungan dengan fenomena dan fokus penelitian. Tipe wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara secara luas dan mendalam atau Indepth interview. Hasilnya adalah bahwa secara empiris memang organisasi intelijen terkait keamanan nasional bukan hanya melibatkan *civil society* didalam kegiatan rahasia intelijen, tetapi juga organisasi politik dan organisasi pemerintah. Secara teori, *civil society* atau bentuk organisasi lainnya

merupakan bentuk dari jaring agen yang dapat digunakan oleh intelijen. Tidak jauh berbeda dengan praktisi intelijen, para akademisi intelijen memaparkan bahwa kemauan mereka untuk terlibat dalam kegiatan intelijen dikarenakan satu dari hal-hal berikut: Uang, ideologi, ego dan dendam organisasi. Para akademisi juga melihat fenomena pelibatan *civil society* maupun bentuk organisasi lainnya dalam kegiatan rahasia intelijen bukan hanya di negara Indonesia, tapi seluruh organisasi intelijen terkait keamanan nasional diseluruh dunia mempraktekkan hal yang sama. Contohnya seperti dalam kasus Arab Spring dan Iran contra. Dalam kajian lokal, para akademisi intelijen mencontohkan kasus CIA menggunakan para separatis lokal sebagai jaring agen untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Keterlibatan CIA ini dapat dilihat dari kasus Allen Pope, dimana penangkapan Allen Pope membongkar saran Eisenhower kepada CIA untuk membantu angkatan udara rahasia bagi pasukan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara. Lebih lanjut narasumber akademisi intelijen mengatakan bahwa fakta-fakta keterlibatan *civil society* dalam kegiatan rahasia intelijen CIA di Indonesia dapat dilihat dari buku karangan Tim Weiner: *Membongkar Kegagalan CIA* (2008) dan buku karangan Ken Conboy & James Morrison: *Feet to the Fire/CIA Covert Operation in Indonesia* (1999).

Selain data primer diatas, peneliti juga berhasil mengumpulkan data sekunder guna mendukung data primer terkait. Dari metode studi dokumen, peneliti berhasil mengumpulkan beberapa data dan teori yang didapat dari dokumen yang berbentuk buku maupun berita. Menurut Hank Prunckun, 2010. menyatakan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Keberagaman sumber-sumber informasi tersebut dapat dikategorikan berdasarkan jenis organisasi intelijennya. Pada umumnya sumber-sumber informasi berdasarkan jenis organisasi intelijen tersebut adalah sama, akan tetapi ada sedikit perbedaan didalam urutan prioritasnya. Berikut ini adalah

urutan skala prioritas sumber informasi untuk *National Security Intelligence* (intelijen guna keamanan nasional).

SKALA PRIORITAS SUMBER INFORMASI INTELIJEN KEAMANAN NASIONAL	
NO	SUMBER INFORMASI
1	Open Source Information
2	Official cover
3	Non Official Cover (NOC)
4	Recruited Agents
5	Diplomatic Missions & Embassies
6	Surveillance Planes
7	Surveillance Satellites
8	Electronic Intercepts
9	Defectors
10	University and independent research bodies
11	Other Government Departments

Tabel 2: Skala Prioritas Sumber Informasi Intelijen Keamanan Nasional (Sumber: Prunckun, 2010).

Dari tabel diatas, dapat dilihat point 4 dan 10 merupakan sumber informasi intelijen keamanan nasional yang berasal dari civil society. Secara teori intelijen memang membutuhkan keterlibatan komponen civil society didalam melakukan aktifitas intelijen guna keamanan nasional. Selain data tersebut, peneliti juga mendapatkan data sekunder yang berasal dari media yang memberitakan bahwa ada kerja sama antara civil society dengan organisasi intelijen. Hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama Badan Intelijen Negara dengan Institut Teknologi Bandung guna membuat produk-produk teknologi intelijen seperti artificial intelligence (AI). Selain itu contoh kerja sama intelijen terkait keamanan nasional dapat dilihat dari kerjasama antara Komite Intelijen Daerah (Kominda) dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) guna meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman konflik sosial. Contoh lainnya juga dapat dilihat dari kerjasama antara Badan Intelijen Negara dengan Yayasan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat terkait deteksi dini ideologi radikal. Output dari contoh-contoh kerjasama tersebut adalah kinerja yang

meningkat pada organisasi intelijen terkait keamanan nasional. Sedangkan outcomenya adalah meningkatnya ketahanan nasional bangsa.

Data sekunder dari hasil observasi yang peneliti dapatkan selama proses penelitian adalah organisasi intelijen di beberapa daerah memang melibatkan civil society guna kegiatan intelijen keamanan nasional. Terlihat aparatur intelijen di daerah berkoordinasi dengan komunitas masyarakat tertentu guna mengumpulkan informasi intelijen. Didalam beberapa pertemuan antara organisasi intelijen dengan civil society yang peneliti ikut hadir, dapat disimpulkan bahwa civil society dengan beberapa motivasi seperti uang, ideologi maupun dendam terhadap target tertentu, bersedia terlibat didalam kegiatan intelijen. Keterlibatan mereka bisa dalam tahap collecting berbentuk pemberian informasi maupun data atau terlibat didalam kegiatan covert action seperti penyuluhan, sosialisasi atau sampai kegiatan deradikalisasi paham ideologi tertentu.

#### 4.2. Penyajian Data (Data Display)

Berdasarkan hasil reduksi data dalam model analisis interaktif dapat kita sajikan data-data tersebut sebagai berikut ini.

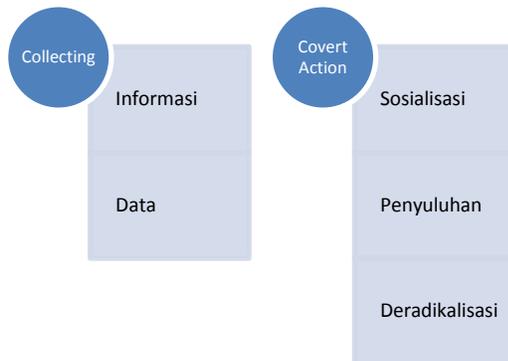
Terdapat tiga variabel yang dipertimbangkan organisasi intelijen didalam melibatkan Organisasi masyarakat dalam kegiatan intelijen keamanan nasional, ketiganya dapat disajikan dalam bentuk bagan berikut.



Bagan 3: Variabel Pelibatan Civil Society Dalam Intelijen Kamnas (Sumber: Analisa Penulis, 2020).

Selain itu, peneliti juga menyajikan data yang telah direduksi sebelumnya terkait dengan

bentuk pelibatan civil society didalam aktifitas intelijen guna meningkatkan ketahanan nasional dibidang keamanan. Hal ini dapat dilihat dari bagan 4, bentuk pelibatan civil society dalam aktifitas intelijen.



Bagan 4: Bentuk Pelibatan Civil Society Dalam Aktifitas Intelijen (Sumber: Analisa Penulis, 2020).

## 5. Kesimpulan dan Saran

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan terhadap data yang disajikan. Berdasarkan hasil data primer dan sekunder yang dianalisa oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelibatan civil society didalam aktifitas intelijen guna keamanan nasional memang ada. Secara teori maupun empiris, pelibatan ini telah terjadi dan dapat dibenarkan implementasinya. Ada dua peran yang dapat diberikat civil society dalam aktifitas intelijen, yaitu peran collecting information dan peran covert action. Peran yang pertama dalam bentuk pemberian informasi maupun data ke organisasi intelijen keamanan nasional, sedangkan peran kedua dalam bentuk penyuluhan & sosialisasi serta deradikalisasi. Pelibatan civil society ini terbukti meningkatkan kinerja dari organisasi intelijen guna menciptakan ketahanan nasional dibidang keamanan nasional.

## Daftar Pustaka

- Conboy, Kenneth., Morrison, James. (1999) *Feet to the Fire: CIA Covert Operation in Indonesia, 1957-1958*. Annapolis, MD: Naval Institute Press.
- Kent, Sherman. (1950) *Strategic Intelligence for American World Policy*, Princeton Legacy Library.
- Matrutty, Hanfry A.R. (2019, Jan 29). Definisi dan Tipologi Civil Society. <https://www.kompasiana.com/hanfrymatrutty/5c50374f43322f46724929e3/definisi-dan-tipologi-civil-society?page=all>.
- Mardalis, (1999) *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pruncun, Hank. (2010) *Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, The Scarecrow Press Inc, UK.
- Soedjono dan Abdurrahman, (2005) *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supardin. (2014) *Analisis Sosiologi Hukum dalam Realitas Fikih Sosial*. Al-dakwah Vol.3/No.1/Juni 2014.
- Weiner, Tim. (2008) *Membongkar Kegagalan CIA: Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yuda, Endra. (2013, Agust 29). Pengaruh Struktur Sosial pada Lembaga Sosial dan Kebudayaan Terhadap Struktur Politik. <https://feelinbali.blogspot.com/2013/08/pengaruh-struktur-sosial-pada-lembaga.html>.